

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan IPH DIY

Komoditas	Satuan	Jan	Feb	Mar
Beras Cap C4 (Medium)	1 Kg	12.770	13.237	13.222
Beras Cap IR 64 (Medium)	1 Kg	13.500	13.500	13.680
SPHP Bulog	1 Kg	12.500	12.450	12.286
Gula Pasir Curah	1 Kg	17.695	17.675	17.122
Gula Pasir Kemasan	1 Kg	18.820	18.970	18.888
Minyak Goreng Curah	1 Liter	17.500	18.040	19.744
Minyak Goreng Kemasan Premium	1 Liter	20.500	20.487	21.094
Minyakita	1 Liter	15.671	15.600	15.696
Daging Sapi Paha Belakang	1 Kg	135.000	135.425	145.076
Daging Sapi Paha Depan	1 Kg	135.000	132.312	139.236
Daging Sapi Sandung Lamur	1 Kg	87.500	88.125	93.780
Daging Ayam Ras Karkas	1 Kg	33.893	38.478	41.013
Daging Ayam Kampung Utuh	1 Ekor	107.500	106.337	107.430
Telur Ayam Ras	1 Kg	29.125	29.527	28.584
Telur Ayam Kampung	1 Kg	55.000	54.050	51.200
Cabai Merah Keriting	1 Kg	36.000	40.068	37.270
Cabai Merah Besar	1 Kg	41.700	39.800	45.940

Cabai Rawit Merah	1 Kg	45.800	83.459	88.184
Cabai Rawit Hijau	1 Kg	60.700	54.379	56.171
Bawang Merah	1 Kg	35.500	37.830	38.134
Bawang Putih Honan	1 Kg	31.500	31.455	31.291
Bawang Putih Kating	1 Kg	34.419	33.750	33.714
Bawang Bombai	1 Kg	35.000	34.345	32.630

Berdasarkan hasil pemantauan harga rata-rata komoditas pangan strategis selama Triwulan I 2026, perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) menunjukkan adanya tekanan harga pada awal tahun yang kemudian mulai mereda pada akhir triwulan. Secara umum, pergerakan harga komoditas dipengaruhi oleh dinamika pasokan menjelang panen raya, peningkatan permintaan masyarakat, serta intervensi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pada Februari 2026, sebagian komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan relatif tinggi terjadi pada kelompok beras, khususnya beras medium, yang didorong oleh terbatasnya pasokan gabah pada periode awal tahun serta peningkatan permintaan rumah tangga. Selain itu, beberapa komoditas seperti minyak goreng dan gula pasir kemasan juga mengalami kenaikan terbatas. Kondisi tersebut mendorong IPH Februari 2026 berada pada zona inflasi, meskipun masih dalam rentang terkendali.

Memasuki Maret 2026, perkembangan harga mulai menunjukkan tren yang lebih stabil. Beberapa komoditas strategis mengalami penurunan harga, terutama gula pasir curah dan beras SPHP, seiring dengan mulai masuknya pasokan dari daerah sentra produksi dan meningkatnya intensitas intervensi pemerintah melalui operasi pasar serta distribusi pangan. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti beras IR 64 dan komoditas hortikultura tertentu masih mencatatkan kenaikan terbatas, namun tidak memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Triwulan I 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga tertinggi terjadi pada Februari 2026 dan mulai mereda pada Maret 2026. Stabilitas harga yang lebih terjaga pada akhir triwulan mencerminkan mulai membaiknya kondisi pasokan serta efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan melalui penguatan koordinasi TPID, pelaksanaan operasi pasar, optimalisasi distribusi pangan, serta pemantauan harga secara rutin.

Ke depan, risiko peningkatan IPH tetap perlu diwaspadai terutama pada komoditas beras, cabai, dan komoditas hortikultura yang memiliki volatilitas tinggi. Selain itu, peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional serta potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca juga dapat memicu tekanan harga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

langkah pengendalian melalui pemantauan pasokan, pelaksanaan operasi pasar secara terarah, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan Inflasi DIY

Perkembangan inflasi DIY (Month-to-Month)

	TRIWULAN IV 2025			TRIWULAN I 2026		
	OKT (%)	NOV (%)	DES (%)	JAN (%)	FEB (%)	MAR (%)
YOGYAKARTA	0.42	0.27	0.65	-0.16	0.68	0.45

Perkembangan Inflasi DIY (Year on Year)

	JAN (%)	FEB (%)	MAR (%)	APR (%)	MEI (%)	JUN (%)	JUL (%)	AGS (%)	SPT (%)	OKT (%)	NOV (%)	DES (%)
2023	6.05	6.28	6.11	5.14	4.72	4.20	4.00	4.08	3.30	3.44	3.48	3.17
2024	2.60	2.75	2.95	2.87	2.28	2.35	2.16	2.33	1.85	1.57	1.14	1.28
2025	0.95	-0.30	0.52	2.10	2.04	2.52	2.60	2.30	2.56	2.90	2.92	3.11
2026	3.30	4.91	4.08									

Inflasi antar wilayah cakupan IHK DIY

Bulan	DIY		Kota Yogyakarta		Kabupaten Gunungkidul	
	MtM	YoY	MtM	YoY	MtM	YoY
Januari	-0.16	3.30	-0.14	3.55	-0.17	3.11
Februari	0.68	4.91	0.72	5.19	0.66	4.70
Maret	0.45	4.08	0.33	4.19	0.55	3.98

Secara m-to-m Pada **bulan Januari 2026** DIY mengalami deflasi sebesar -0.16% (mtm). Kabupaten Gunungkidul dan kota Yogyakarta tercatat juga mengalami deflasi sebesar -0.17% (mtm) dan -0.14% (mtm). Penyumbang utama deflasi bulan Januari 2026 secara m-t-m adalah kelompok makanan. Minuman, dan tembakau dengan andil 0.43%, dengan komoditas penyumbang utama deflasi adalah cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Januari 2026 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.28	Cabai merah	-0,11
Sepeda motor	0.02	Daging ayam ras	-0.08
Kacang tanah	0.01	Cabai rawit	-0.07
Bawang putih	0.01	Bawang merah	-0.05
Bayam	0.01	Bensin	-0.04

Secara y-on-y Pada **bulan Januari 2026** DIY terjadi inflasi sebesar 3.30% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 3.11% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 3.55% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2026 secara y-on-y adalah tarif listrik dan emas perhiasan. Tabel penyumbang utama inflasi bulan Januari 2026 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Tarif listrik	1,25	Cabai merah	-0,12
Emas perhiasan	1.13	Cabai rawit	-0.05
Beras	0,14	Bawang putih	-0.05
Sigaret kretek mesin	0.07	Tomat	-0.05
Sigaret kretetk tangan	0.06	Buncis	-0.05

Secara m-to-m Pada **bulan Februari 2026** DIY mengalami inflasi sebesar 0.68% (mtm). Kabupaten Gunungkidul juga tercatat mengalami inflasi sebesar 0.66% (mtm) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 0.72% (mtm). Komoditas penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara m-to-m adalah cabai rawit dan daging ayam ras. Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Februari 2025 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Emas perhiasan	0.30	Bensin	-0.06
Cabai rawit	0.12	Kelapa	-0.04
Daging ayam ras	0.07	Wortel	-0.02
Cabai merah	0.03	Cabai hijau	-0.01
Telur ayam ras	0.03	Jeruk	-0.01

Secara y-on-y Pada **bulan Februari 2025** DIY juga mengalami inflasi sebesar 4.91% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 4.70% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 5.19% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara y-on-y adalah tarif listrik dan emas perhiasan. Berikut tabel penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Tarif listrik	2.32	Bensin	-0.11
Emas perhiasan	1,37	Bawang putih	-0.05
Beras	0.17	Cabai merah	-0.05
Daging ayam ras	0.10	Kentang	-0.02
Bawang merah	0.06	Tomat	-0.02

Secara m-to-m Pada **bulan Maret 2026** DIY mengalami inflasi sebesar 0.45% (mtm). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 0.55% (mtm) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 0.33% (mtm).penyumbang utama inflasi bulan Maret 2026 secara m-to-m adalah daging ayam ras, bayam dan tomat. Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Maret 2026 (m-to-m):

ANDIL INFLASI (m-to-m)		ANDIL DEFLASI (m-to-m)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Bensin	0.05	Angkutan udara	-0.02
Daging ayam ras	0.05	Wortel	-0.02
Emas perhiasan	0.05	Bawang putih	-0.01

Bayam	0.03	Pisang	-0.01
Tomat	0.02	Cabai hijau	-0.01

Secara y-on-y Pada **bulan Maret 2026** DIY mengalami inflasi sebesar 4.08% (yoy). Kabupaten Gunungkidul tercatat mengalami inflasi sebesar 3.98% (yoy) dan Kota Yogyakarta tercatat mengalami inflasi sebesar 4.19% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2026 secara y-on-y adalah tarif listrik dan emas perhiasan. Berikut tabel komoditas penyumbang inflasi/deflasi bulan Maret 2026 secara *year on year*:

ANDIL INFLASI (y-on-y)		ANDIL DEFLASI (y-on-y)	
Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Deflasi (%)
Tarif listrik	1.42	Bawang putih	-0.07
Emas perhiasan	1.34	Bensin	-0.06
Beras	0.14	Cabai merah	-0.05
Daging ayam ras	0.13	Wortel	-0.05
Buncis	0.08	Kelapa	-0.03

Risiko Inflasi ke Depan

Ke depan, tekanan inflasi daerah masih perlu diwaspadai seiring meingkatnya permintaan masyarakat pada periode HBKN Idul Fitri dan Pasca HBKN. Peningkatan konsumsi terutama pada komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang merah, dan gula berpotensi mendorong kenaikan harga apabila tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Selain itu, komoditas hortikultura yang bersifat volatile food masih menghadapi risiko fluktuasi akibat faktor cuaca, gangguan produksi, serta keterbatasan pasokan dari daerah pemasok.

Dari sisi *administered price*, potensi penyesuaian harga energi serta peningkatan tarif transportasi pada periode mudik dan arus balik juga dapat memberikan tekanan inflasi. Peningkatan mobilitas, masyarakat berpotensi mendorong kenaikan biaya distribusi barang, terutama untuk komoditas pangan segar yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelancaran logistik.

Selanjutnya, risiko inflasi juga bersumber dari dinamika harga komoditas global, khususnya energi dan emas, yang dapat memengaruhi harga domestik. Selain itu, potensi gangguan distribusi akibat kepadatan lalu lintas selama periode HBKN, kondisi cuaca ekstrem, serta keterbatasan stok di tingkat pedagang menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, diperlukan penguatan koordinasi TPID melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan kerja sama antar daerah, serta pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga secara intensif guna memastikan stabilitas harga dan menjaga inflasi daerah tetap terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Salah satu hambatan utama dalam pengendalian inflasi adalah komoditas yang harganya ditentukan oleh kebijakan pusat, sehingga sulit diintervensi oleh Pemerintah Daerah secara langsung diantaranya:
 - Tarif listrik menjadi penyumbang utama inflasi seara y-on-y secara konsisten selama Triwulan I 2026.

Bensin, meskipun sempat memberikan andil deflasi pada Februari 2026, bensin kembali menjadi penyumbang inflasi pada Maret 2026

2. Fluktuasi harga komoditas pangan hewani dan hortikultura tetap menjadi tantangan bulanan bagi TPID DIY.
 - Daging ayam ras dan telur: tercatat sebagai penyumbang utama inflasi pada bulan Februari dan Maret 2026
 - Hortikultura (Cabai dan Bawang): memberikan andil inflasi yang signifikan pada Februari 2026. Sebaliknya, penurunan harga cabai merah pada Januari justru memberikan andil deflasi yang besar, hal ini menunjukkan tingginya volatilitas harga pada kelompok ini.
 3. Menjelang periode tertentu, tarif angkutan antar kota mulai memberikan andil inflasi di DIY. Hal ini menuntut pengawasan ketat terhadap tarif transportasi pada masa puncak kunjungan wisata atau mudik.
 4. Inflasi tahunan di DIY banyak didorong oleh Komoditas Non-pangan yaitu taif listrik dan emas perhiasan
 5. Fluktuasi harga daging ayam dan hortikultura menunjukkan kerentanan pasokan pangan lokal terhadap perubahan musim atau rantai distribusi.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di DIY selama Triwulan I 2026 menunjukkan penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam menghadapi periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1447 H. Berbagai langkah yang ditempuh melalui strategi 4K dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis di wilayah DIY.

Dari sisi **Ketersediaan Pasokan**, TPID DIY telah melakukan penguatan perencanaan melalui pemetaan produksi dan kebutuhan pangan berbasis *Geographic Information System* (GIS) SPPG serta pemetaan keluar masuk pasokan komoditas. Selain itu, pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY dan kabupaten/kota menjelang HBKN turut memperkuat koordinasi dalam menjaga kecukupan pasokan. Langkah tersebut dinilai efektif dalam mengantisipasi potensi kekurangan pasokan selama periode peningkatan permintaan, meskipun ke depan masih diperlukan penguatan integrasi data produksi dan distribusi secara lebih real time.

Pada aspek **Keterjangkauan Harga**, stabilisasi harga dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah sebanyak 61 kali hingga Maret 2026 serta optimalisasi kios pangan sebagai *price reference store* seperti Segoro Amarto, MRANTASI, dan Kendil Simbok. Kebijakan ini cukup efektif dalam menahan kenaikan harga komoditas pangan strategis selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Namun demikian, cakupan lokasi intervensi harga masih perlu diperluas agar dampaknya lebih merata, khususnya pada wilayah dengan volatilitas harga tinggi.

Dari sisi **Kelancaran Distribusi**, pemantauan pasar oleh Kepala Daerah di seluruh kabupaten/kota serta pemetaan arus masuk dan keluar pasokan menjadi langkah penting dalam memastikan distribusi berjalan lancar. Koordinasi lintas wilayah melalui TPID juga membantu meminimalkan potensi gangguan distribusi selama periode HBKN. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan perlunya penguatan kerja sama antar daerah pemasok serta sistem early warning terhadap gangguan distribusi akibat faktor cuaca dan logistik.

Pada aspek **Komunikasi Efektif**, TPID DIY telah melakukan press conference hasil pemantauan menjelang HBKN serta kampanye belanja bijak melalui media sosial, koran, dan videotron. Upaya komunikasi ini berperan dalam menjaga ekspektasi masyarakat dan menekan potensi *panic buying*. Ke depan, komunikasi publik perlu diperkuat dengan penyampaian informasi harga harian dan ketersediaan pasokan secara lebih masif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, implementasi strategi 4K pada Triwulan I 2026 berjalan cukup baik dan mampu menjaga stabilitas harga pada periode tekanan musiman. Ke depan, penguatan integrasi data pasokan, perluasan intervensi harga, peningkatan kerja sama antar daerah, serta optimalisasi komunikasi publik menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah selama Triwulan I 2026 secara umum **berjalan efektif namun masih menghadapi tekanan dari kelompok pangan bergejolak dan *administered price***. Upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K telah dilaksanakan oleh TPID, namun peningkatan permintaan musiman serta fluktuasi pasokan komoditas hortikultura menyebabkan inflasi tetap menunjukkan tren meningkat.

1. Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga ketersediaan pasokan telah dilakukan melalui koordinasi dengan daerah pemasok dan pemantauan stok komoditas strategis secara berkala. Ketersediaan komoditas utama seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, dan daging ayam ras secara umum dalam kondisi aman selama Triwulan I 2026. Namun demikian, beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran masih mengalami fluktuasi harga akibat pasokan yang terbatas dan faktor cuaca, sehingga pengendalian inflasi dari sisi pasokan belum sepenuhnya optimal.

2. Keterjangkauan Harga

Kebijakan menjaga keterjangkauan harga telah dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta stabilisasi harga beras melalui program SPHP. Pelaksanaan kegiatan tersebut cukup membantu menahan kenaikan harga pada beberapa komoditas, khususnya beras dan minyak goreng. Namun demikian, tekanan harga pada komoditas pangan segar seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras masih terjadi seiring peningkatan permintaan menjelang Ramadan.

3. Kelancaran Distribusi

Dari sisi distribusi, koordinasi lintas instansi dan pemantauan distribusi bahan pangan telah dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan. Secara umum distribusi komoditas pangan strategis berjalan lancar tanpa gangguan signifikan. Meski demikian, kenaikan biaya logistik dan peningkatan mobilitas masyarakat menjelang HBKN mulai memberikan tekanan terhadap harga di tingkat konsumen, khususnya untuk komoditas pangan segar yang sensitif terhadap biaya distribusi.

4. Komunikasi Efektif

Upaya komunikasi efektif telah dilakukan melalui pemantauan harga harian, rapat koordinasi TPID, serta publikasi perkembangan inflasi kepada masyarakat. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi teknis dinilai cukup efektif dalam memperkuat sinergi antar instansi. Selain itu, imbauan belanja bijak dan publikasi ketersediaan pasokan turut membantu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Namun demikian, penguatan komunikasi terkait kondisi pasokan dan intervensi harga masih perlu ditingkatkan untuk meredam ekspektasi kenaikan harga menjelang HBKN.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketersediaan Pasokan

Pemerintah daerah bersama TPID perlu memastikan kecukupan pasokan komoditas pangan strategis melalui penguatan koordinasi dengan daerah pemasok serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam ras. Selain itu, diperlukan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan pelaksanaan gerakan tanam cepat (*quick win*) komoditas hortikultura untuk menjaga pasokan jangka pendek. Pemantauan stok secara berkala di distributor, pedagang besar, dan pasar tradisional juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan. Selain itu, perlunya optimalisasi peran BUMD untuk memperkuat peran BUMD sebagai *offtaker* hasil produksi petani lokal untuk menjamin keberlangsungan pasokan di tingkat konsumen dan menjaga harga di tingkat produsen.

2. Keterjangkauan Harga

Upaya menjaga keterjangkauan harga dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar murah, subsidi transportasi komoditas pangan, serta intervensi harga bekerja sama dengan BUMN pangan dan distributor. Pelaksanaan pasar murah perlu difokuskan pada wilayah dengan tekanan harga tinggi serta menjelang HBKN. Selain itu, optimalisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) khususnya komoditas beras perlu diperkuat untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran arus logistik melalui koordinasi lintas instansi, termasuk pengaturan lalu lintas distribusi barang selama periode mudik Lebaran. Fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit perlu ditingkatkan melalui dukungan transportasi dan pemetaan jalur distribusi utama. Selain itu, penguatan kerja sama dengan pelaku usaha transportasi dan distributor pangan menjadi penting untuk meminimalkan kenaikan biaya distribusi.

4. Komunikasi Efektif

Penguatan Neraca Pangan dengan melakukan penyusunan neraca pangan daerah yang akurat dengan mempertimbangkan mobilitas wisatawan serta fluktuasi kebutuhan musiman sebagai basis kebijakan stabilisasi. Penguatan komunikasi publik perlu dilakukan melalui penyampaian informasi perkembangan harga secara rutin, imbauan

belanja bijak kepada masyarakat, serta publikasi ketersediaan stok pangan. *High Level Meeting* (HLM) TPID juga perlu dilaksanakan secara intensif sebagai forum koordinasi pengambilan kebijakan cepat. Selain itu, penguatan pemantauan harga harian dan *early warning system* diperlukan untuk mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengendalian inflasi perlu difokuskan pada penguatan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan inflasi daerah berada dalam rentang sasaran nasional.